

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Inflasi

Gea Ananda Putri Septiyanti¹, Dea Hermalia Putri², Nanditha Dwi Zirani³,
Wahjoe Pangestoeti⁴

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jalan Raya Dompok Tanjungpinang Tel. +62-771-4500089, Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 01, 2025

Revised June 18 2025

Accepted June 20, 2025

Available online June 25, 2025

Kata Kunci:

pengangguran, inflasi, kebijakan pemerintah, intervensi harga

Keywords:

unemployment, inflation, government policy, price intervention



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi dua persoalan utama ekonomi makro, yaitu pengangguran dan inflasi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis terhadap berbagai sumber literatur, ditemukan bahwa pengangguran di Indonesia dipicu oleh faktor struktural seperti mismatch tenaga kerja, ketimpangan pertumbuhan sektoral, serta ketidaksiapan SDM menghadapi perubahan teknologi. Sementara itu, inflasi dipengaruhi oleh kombinasi faktor moneter dan non-moneter, termasuk tekanan harga global, distribusi barang yang terganggu, serta penyesuaian kebijakan subsidi. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan seperti pelatihan vokasi, program padat karya, stimulus ekonomi, serta intervensi harga dan subsidi langsung. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kebijakan tersebut memberikan dampak jangka pendek yang cukup signifikan, efektivitas jangka panjangnya masih terbatas oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidaktepatan sasaran, dan lemahnya evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan strategi terpadu dan lintas sektor yang mampu menyentuh akar persoalan ekonomi secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Indonesian government in addressing two major macroeconomic issues: unemployment and inflation. Using a descriptive qualitative approach and analysis of various literature sources, it was found that unemployment in Indonesia is driven by structural factors such as labor mismatch, sectoral growth inequality, and human resource unpreparedness in adapting to technological change. Meanwhile, inflation is influenced by a combination of monetary and non-monetary factors, including global price pressures, disrupted distribution chains, and adjustments to subsidy policies. The government has implemented various policies such as vocational training, labor-intensive programs, economic stimulus, and direct price interventions and subsidies. The study reveals that while these policies have shown short-term impact, their long-term effectiveness is limited by inter-agency coordination gaps, targeting inaccuracies, and weak policy evaluation. Therefore, an integrated and cross-sectoral strategy is required to address the root causes of these economic issues more comprehensively and sustainably.

1. PENDAHULUAN

Pengangguran dan inflasi merupakan dua permasalahan ekonomi makro yang saling berkelindan dan berpotensi menghambat pembangunan nasional. Di Indonesia, kompleksitas keduanya tidak hanya memengaruhi kinerja ekonomi secara agregat, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, daya beli rumah tangga, dan stabilitas sosial. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 5,32%, menunjukkan perbaikan dibandingkan masa pandemi, namun masih menyisakan persoalan struktural seperti mismatch antara pasar tenaga kerja dan lulusan pendidikan (BPS, 2023). Di sisi lain, laju inflasi pada tahun 2022 tercatat sebesar 5,51% year on year, dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat disrupsi global serta penyesuaian subsidi dalam negeri. Tekanan inflasi yang cukup tinggi tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi penting untuk dikaji karena keduanya saling mempengaruhi melalui dinamika permintaan dan penawaran agregat, serta dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah dalam merespons kondisi ekonomi.

Peran aktif pemerintah dalam menanggulangi pengangguran dan inflasi menjadi sebuah keniscayaan dalam sistem ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan sosial. Dalam konteks

ekonomi Indonesia, kebijakan fiskal, subsidi, insentif usaha, program padat karya, serta intervensi harga menjadi instrumen utama yang digunakan pemerintah. Pemerintah diharapkan tidak hanya bersikap reaktif terhadap gejala ekonomi, tetapi juga proaktif dalam menciptakan stabilitas jangka panjang. Studi oleh Momon Ompu Citoro dkk, menegaskan bahwa "strategi penanganan inflasi yang bersinergi dengan kebijakan ketenagakerjaan terbukti lebih efektif menekan dampak jangka panjang terhadap ekonomi rumah tangga" (M. Momon Ompu Citoro dkk., 2024). Ini menunjukkan bahwa pentingnya keterpaduan antara instrumen kebijakan yang diterapkan. Kebijakan yang hanya berfokus pada sisi moneter seperti pengendalian suku bunga tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lapangan kerja cenderung menghasilkan dampak yang timpang.

Dalam literatur ekonomi klasik dan kontemporer, hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan melalui kurva Phillips, yang menyatakan adanya hubungan trade-off antara keduanya dalam jangka pendek. Namun, banyak ekonom kontemporer, seperti Milton Friedman dan Edmund Phelps, menolak kesimpulan jangka panjang tersebut dengan menekankan konsep natural rate of unemployment dan ekspektasi rasional. Dalam konteks Indonesia, fenomena stagflasi atau terjadinya inflasi tinggi bersamaan dengan pengangguran yang meningkat menunjukkan bahwa korelasi keduanya tidak selalu linier. Penelitian oleh Terisha dkk, menunjukkan bahwa "kenaikan inflasi periode 2011– 2021 berkontribusi signifikan terhadap ancaman pengangguran terutama di sektor informal dan berpendidikan rendah" (Terisha dkk., 2023). Temuan ini menegaskan bahwa pengaruh inflasi tidak homogen di semua kelompok masyarakat, melainkan berdampak lebih besar pada kelompok rentan.

Dinamika struktural seperti pertumbuhan penduduk usia produktif yang tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja turut memperparah persoalan pengangguran. Hutagalung dkk, menjelaskan bahwa "tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat ketika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi oleh transformasi sektor produktif dan perluasan pasar kerja" (Hutagalung dkk., 2024). Dalam hal ini, peran pemerintah dalam mengarahkan investasi, memberikan pelatihan vokasi, serta mendorong kewirausahaan menjadi krusial. Pemerintah juga dituntut untuk mampu menyelaraskan kebijakan sektoral agar tercipta sinergi antara penciptaan kerja dan pengendalian harga, dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada konteks pasca-pandemi dan krisis global yang menyebabkan gangguan besar dalam rantai pasok serta volatilitas harga global. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi, seperti program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), namun efektivitasnya dalam jangka panjang masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi dua tantangan utama ekonomi nasional: pengangguran dan inflasi, serta menganalisis relevansi kebijakan yang telah diterapkan dalam konteks teoritis dan empiris. Dengan menelaah data makroekonomi terbaru dan membandingkannya dengan pendekatan kebijakan yang telah dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya kajian literatur mengenai efektivitas peran negara dalam mengendalikan variabel makroekonomi melalui instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, manfaat praktisnya terletak pada pemberian masukan berbasis data kepada pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam merancang strategi ekonomi yang holistik dan adaptif. Putri dkk, menyatakan bahwa "sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan nasional masih menjadi tantangan besar dalam mengurangi angka pengangguran secara merata" (Putri dkk., 2022). Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan desentralistik yang tetap berorientasi pada kerangka nasional agar efektivitas kebijakan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan inflasi di Indonesia. Data dalam penelitian ini bersumber dari

literatur sekunder, berupa jurnal-jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan resmi pemerintah, serta berita ekonomi yang relevan dan terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan membaca dan menelaah sumber-sumber referensi tersebut secara sistematis. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar pencatatan data dan template analisis isi untuk mengorganisir informasi penting dari setiap dokumen yang ditelaah.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan cara mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama, seperti kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, stabilisasi harga, serta efektivitas implementasi kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang logis dan berbasis data terhadap fenomena yang dikaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pengangguran di Indonesia

Permasalahan pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun telah menunjukkan perbaikan sejak masa pandemi COVID-19, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia masih mencerminkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan. Fenomena ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, TPT mencapai angka 5,32%. Angka ini memang mengalami penurunan dari puncak masa pandemi, tetapi tetap mengindikasikan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Terlebih lagi, pengangguran yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh transformasi struktural dan perubahan dinamika pasar kerja yang kian kompleks (Hutagalung dkk., 2024).

Tren pengangguran di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Perpindahan tenaga kerja ini tidak selalu disertai dengan keterampilan yang memadai, sehingga menyebabkan mismatch antara kebutuhan dunia usaha dengan kompetensi pencari kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang bersifat kapital intensif juga menyebabkan penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan peningkatan output nasional. Hal ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran terselubung serta pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kerja maupun perlindungan sosial yang memadai (Putri dkk., 2022).

Secara sosial dan ekonomi, dampak pengangguran sangat kompleks. Di tingkat individu, pengangguran dapat mengakibatkan penurunan pendapatan, hilangnya produktivitas, dan meningkatnya beban psikologis seperti stres dan ketidakpastian masa depan. Pada skala yang lebih luas, pengangguran turut meningkatkan angka kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial. Kondisi ini dapat diperburuk apabila terjadi dalam waktu yang panjang dan tidak diimbangi dengan intervensi pemerintah yang efektif. Seperti yang disampaikan oleh Terisha dkk. (2023), "ancaman pengangguran cenderung meningkat pada kelompok berpendidikan rendah dan sektor informal, khususnya pada periode pasca kenaikan inflasi antara tahun 2011 hingga 2021." Temuan ini menggarisbawahi pentingnya diferensiasi kebijakan dalam merespons dampak pengangguran berdasarkan kelompok sosial dan sektor ekonomi tertentu.

Dari sisi struktural, penyebab utama pengangguran di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama. Pertama, adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keahlian teknis dan vokasional cenderung mengalami kesulitan dalam memasuki pasar kerja yang menuntut keterampilan praktis. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif menyebabkan sebagian wilayah dan kelompok sosial tidak memperoleh manfaat optimal dari ekspansi ekonomi. Hal ini terlihat dari tingginya konsentrasi lapangan kerja di daerah perkotaan dan rendahnya investasi di daerah tertinggal. Ketiga, perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi menuntut adaptasi tenaga kerja, namun belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh (Momon Ompu Citoro dkk., 2024).

Lebih lanjut, dinamika pengangguran juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis Global, fluktuasi harga komoditas, dan disrupsi rantai pasok. Dalam konteks Indonesia,

dampak globalisasi dan keterbukaan ekonomi dapat memberikan peluang pertumbuhan, namun juga menimbulkan tekanan terhadap pasar kerja domestik, terutama di sektor yang belum kompetitif. Oleh karena itu, strategi pengurangan pengangguran tidak dapat dilakukan secara sektoral atau reaktif, melainkan harus menyentuh aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurut Fernando dkk, efektivitas kebijakan pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan untuk membaca dinamika ekonomi dan sosial yang cepat berubah, serta menjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penciptaan lapangan kerja (Fernando dkk., 2022). Pemerintah Indonesia sendiri telah meluncurkan berbagai program seperti pelatihan vokasional, insentif pajak bagi pelaku usaha, serta stimulus ekonomi melalui program padat karya. Namun, efektivitas dari kebijakan ini masih menjadi perdebatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartati, meskipun terdapat hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, “kebijakan makro yang bersifat umum tidak selalu mampu mengatasi permasalahan pengangguran jika tidak diiringi dengan reformasi struktural pada pasar tenaga kerja” (Hartati, 2020). Ini berarti bahwa upaya penanggulangan pengangguran memerlukan kombinasi antara kebijakan makro dan mikro yang tepat sasaran.

B. Analisis Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang sangat penting dalam mengukur stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, tren inflasi di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Setelah sempat mencapai angka rendah di masa pandemi COVID-19, inflasi kembali meningkat pada tahun 2022 hingga awal 2023, yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, energi global, serta komoditas pangan pokok. Data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa laju inflasi tahunan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 5,51%, yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2015. Kondisi ini memperlihatkan adanya tekanan dari sisi suplai yang memengaruhi daya beli masyarakat dan mengganggu kestabilan ekonomi rumah tangga (Terisha dkk., 2023).

Secara umum, inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor moneter dan non-moneter. Dari sisi moneter, peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan output produksi menjadi salah satu penyebab utama inflasi. Ketika likuiditas di pasar terlalu tinggi, konsumsi masyarakat meningkat, sementara ketersediaan barang dan jasa tetap, sehingga mendorong harga naik. Sementara itu, dari sisi non-moneter, inflasi juga didorong oleh faktor eksternal seperti harga komoditas global, gangguan rantai pasok, dan kebijakan fiskal terkait subsidi energi serta tarif dasar listrik. Penelitian oleh Hartati menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia bersifat campuran antara cost- push dan demand-pull, tergantung pada dinamika ekonomi global dan domestik (Hartati, 2020). Artinya, pemerintah perlu merespons dengan kebijakan yang bersifat fleksibel dan kontekstual, bukan sekadar pendekatan konvensional.

Dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung menurunkan daya beli dan menyebabkan konsumsi rumah tangga menurun. Dalam jangka panjang, inflasi yang tidak terkendali dapat memperluas ketimpangan sosial dan meningkatkan angka kemiskinan. Hutagalung dkk, menyatakan bahwa inflasi memiliki korelasi positif terhadap peningkatan pengangguran di sektor informal dan lapisan masyarakat rentan (Hutagalung dkk., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya menjadi isu makroekonomi, tetapi juga berdampak pada sektor tenaga kerja, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan tetap atau tidak dilindungi oleh sistem pengupahan formal.

Inflasi juga memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak negatif pada iklim investasi dan stabilitas harga jangka panjang. Keputusan investasi sektor swasta sangat sensitif terhadap ekspektasi inflasi, yang pada gilirannya mempengaruhi penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks ini, inflasi berperan sebagai penghambat pertumbuhan inklusif. Fernando dkk, juga menambahkan bahwa kenaikan inflasi menyebabkan beban rumah tangga meningkat secara signifikan, terutama dalam aspek kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, dan energi (Fernando dkk., 2022). Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang efektif menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional.

C. Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran

Menanggulangi pengangguran merupakan salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah telah menjalankan berbagai strategi melalui kebijakan ketenagakerjaan dan pelatihan guna mengurangi jumlah pengangguran, khususnya yang bersifat struktural dan friksional. Salah satu pendekatan utama adalah peningkatan akses terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan kerja melalui program seperti BLK (Balai Latihan Kerja) dan pelatihan berbasis kompetensi. Kebijakan pelatihan kerja yang tepat sasaran dapat menjadi solusi jangka menengah untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan menyerap lapangan kerja baru (Momon Ompu Citoro dkk., 2024).

Program padat karya juga telah digunakan sebagai salah satu langkah konkret dalam merespons pengangguran, terutama di masa krisis. Program ini tidak hanya memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur kecil dan memperkuat daya beli lokal. Terisha dkk. (2023) menyebut bahwa program padat karya tunai terbukti efektif mengurangi dampak langsung pengangguran musiman, meskipun masih menghadapi kendala dalam hal keberlanjutan. Dengan demikian, perlu ada integrasi antara program padat karya dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar dampaknya lebih tahan lama.

Stimulus ekonomi juga berperan besar dalam merespons peningkatan pengangguran akibat perlambatan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyalurkan bantuan kepada sektor-sektor terdampak pandemi, termasuk bantuan langsung tunai, subsidi gaji, serta bantuan produktif untuk pelaku UMKM. Menurut Putri dkk. (2022), penyaluran stimulus ekonomi yang merata dan tepat sasaran dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja serta mendorong keberlanjutan usaha. Akan tetapi, efektivitas implementasi kebijakan ini sangat tergantung pada sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Evaluasi terhadap program-program tersebut menunjukkan adanya capaian yang patut diapresiasi, tetapi juga terdapat ruang untuk perbaikan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dengan realisasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antar lembaga serta kurangnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Clarida dkk. menyoroti bahwa intervensi pemerintah seringkali gagal mencapai hasil optimal akibat ketidaktepatan data sasaran dan keterbatasan sumber daya pengawasan (Clarida dkk., 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring yang berbasis data real-time dan partisipatif untuk memastikan kebijakan dapat menjangkau kelompok sasaran secara efektif.

Strategi penanggulangan pengangguran harus disesuaikan dengan tantangan era digital. Adopsi teknologi dan revolusi industri 4.0 telah menciptakan jenis pekerjaan baru sekaligus menghilangkan pekerjaan lama. Dalam konteks ini, pelatihan digital, peningkatan literasi teknologi, dan dukungan terhadap start-up digital menjadi sangat penting. Lee dkk. menyampaikan bahwa dalam kondisi krisis, multiplier dari belanja pemerintah terhadap sektor ketenagakerjaan menjadi lebih besar dibandingkan masa normal (Lee dkk., 2020). Artinya, peran negara sebagai katalis penciptaan kerja menjadi lebih vital ketika sektor swasta menghadapi tekanan ekonomi.

Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja jangka pendek, melainkan juga harus diarahkan pada transformasi struktural jangka panjang. Kebijakan fiskal sebaiknya difokuskan pada penciptaan kerja langsung yang bersifat produktif, bukan hanya bersifat konsumtif atau bersifat subsidi semata (Ohtake, 2024). Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat berperan sebagai agen pembangunan yang adaptif terhadap perubahan global dan kebutuhan domestik secara seimbang.

D. Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi

Pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia menggunakan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkan harga dan mengendalikan tekanan inflasi. Kebijakan fiskal ditempuh melalui penyesuaian belanja negara, pengelolaan subsidi, serta pengendalian defisit anggaran. Di sisi lain, kebijakan moneter

dilakukan oleh Bank Indonesia dengan instrumen seperti pengaturan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan pengendalian likuiditas (Momon Ompu Citoro dkk., 2024).

Kebijakan fiskal yang diarahkan pada pengendalian inflasi berperan penting terutama dalam menjaga kestabilan harga barang-barang pokok dan energi. Penyesuaian terhadap anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan pangan telah menjadi langkah pemerintah untuk menahan laju inflasi, khususnya pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Hartati (2020), “penyesuaian subsidi yang tidak tepat sasaran justru dapat memicu lonjakan harga dan memperburuk beban ekonomi masyarakat miskin”. Oleh karena itu, desain kebijakan subsidi harus memperhatikan konteks sosial ekonomi agar tidak menimbulkan distorsi yang lebih luas.

Di samping itu, intervensi harga dan pemberian subsidi langsung juga digunakan sebagai instrumen untuk meredam dampak inflasi jangka pendek. Pemerintah secara rutin melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga komoditas seperti beras, minyak goreng, dan telur. Hal ini terbukti cukup efektif menstabilkan harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu. Fernando dkk. (2022) menggarisbawahi bahwa operasi pasar dan intervensi harga oleh pemerintah telah berperan dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak harga global. Namun demikian, efektivitas intervensi ini sangat bergantung pada ketepatan waktu pelaksanaan dan ketersediaan stok barang di pasar.

Efektivitas kebijakan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam membaca dinamika global dan menyesuaikan instrumen kebijakan secara cepat. Risiko pengangguran akibat inflasi lebih tinggi terjadi pada kelompok pekerja informal dan sektor padat karya yang terdampak langsung oleh fluktuasi harga (Ahn & Nguyen, 2025). Oleh karena itu, strategi kebijakan harus fokus pada perlindungan sosial dan adaptasi struktural agar kelompok ini tidak semakin terpinggirkan dalam dinamika pasar kerja.

Keberhasilan pengendalian inflasi tidak lepas dari koordinasi antara pemerintah pusat dan lembaga keuangan, terutama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam praktiknya, koordinasi ini diwujudkan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berfungsi sebagai forum kebijakan terpadu. Menurut Clarida dkk. (2024), koordinasi yang kuat antara otoritas fiskal dan moneter sangat penting untuk merespons tekanan inflasi dan memastikan konsistensi arah kebijakan makroekonomi. Ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal ekspansif dan moneter kontraktif dapat menimbulkan efek saling meniadakan, sehingga inflasi

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah Indonesia dalam menghadapi dua tantangan ekonomi utama: pengangguran dan inflasi. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pengangguran di Indonesia memiliki akar struktural yang kompleks, yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pertumbuhan ekonomi semata. Permasalahan seperti mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar, transformasi sektoral yang tidak inklusif, serta rendahnya daya serap sektor formal menjadi penyumbang utama tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Sementara itu, inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pascapandemi, menunjukkan karakteristik campuran antara tekanan dari sisi permintaan dan sisi biaya produksi. Kenaikan harga komoditas global, penyesuaian subsidi domestik, serta gejolak geopolitik menjadi faktor pemicu utama. Inflasi tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat tetapi juga memperbesar beban hidup kelompok berpenghasilan rendah dan memperparah ketimpangan sosial.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam aspek ketenagakerjaan, program pelatihan vokasi, insentif usaha, serta padat karya menunjukkan capaian yang signifikan, terutama pada periode krisis. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala dalam aspek distribusi, keberlanjutan, dan koordinasi antar-lembaga. Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menerapkan bauran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia serta intervensi harga dan subsidi langsung yang cukup berhasil menahan lonjakan harga secara jangka pendek. Meskipun

demikian, kebijakan tersebut masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu menjangkau akar struktural penyebab inflasi.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi sudah berada pada arah yang tepat, namun masih memerlukan penguatan pada sisi koordinasi, keberlanjutan, dan integrasi lintas sektor. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat jangka pendek dan sektoral, tetapi juga menyentuh aspek struktural secara lebih mendalam dan menyeluruh. Penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan data ketenagakerjaan dan harga, serta peningkatan sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menanggulangi dua persoalan ekonomi ini secara simultan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn, H. J., & Nguyen, L. (2025). *Who's at Risk? Effects of Inflation on Unemployment Risk* (Versi 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2505.05757>
- Clarida, R. H., Burriel, P., Kataryniuk, I., Pérez, C. M., Viani, F., Ha, J., So, I., Clancy, D., Smith, D., & Valenta, V. (2024). International Journal of Central Banking. *International Journal of Central Banking*, 20(2).
- Fernando, R., Wijaya, R. C., & Agustian, W. (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 502–506.
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2010 – 2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 92–119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>
- Hutagalung, S. B. L., Purba, M. L., & Purba, E. F. (2024). Menelusuri Dinamika Pengangguran Terbuka: Peran Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi di Indonesia (2000-2021). *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 151–166.
- Lee, S., Liao, Y., Seo, M. H., & Shin, Y. (2020). Desperate Times Call For Desperate Measures: Government Spending Multipliers In Hard Times. *Economic Inquiry*, 58(4), 1949–1957. <https://doi.org/10.1111/ecin.12919>
- M. Momon Ompu Citoro, Septina Kusumaningtyas, & Trison Andreas Manullang. (2024). Studi Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Inflasi Dan Tingkat Pengangguran. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 1(4), 200–213. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.316>
- Ohtake, K. (2024). A micro-founded comparison of fiscal policies between indirect and direct job creation. *Metroeconomica*, 75(4), 419–437. <https://doi.org/10.1111/meca.12459>
- Putri, I. M., Hutagalung, M., Mahendra, R. A., & Yuwono, W. (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Pada Provinsi Banten. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 3(1), 1458–1466.
- Terisha, F., Melvin, Owen, Sahara, P., & Sadrakh, R. (2023). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi di Indonesia Periode 2011-2021. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(1), 52–57. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i1.435>